



PERAN GERAKAN MAHASISWA DALAM MENYAMPAIKAN ASPIRASI TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH DI KOTA MAKASSAR

¹Muhammad Nur*, ²Rahmawati

^{1,2} Universitas Negeri Makassar, Indonesia

Email: muhammad.nur@unm.ac.id

*Corresponding author: Muhammad Nur

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor pendorong munculnya gerakan sosial demonstrasi mahasiswa dan tahapan-tahapan gerakan sosial demonstrasi mahasiswa sebagai kritik terhadap Pemerintah di kota Makassar. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kajian pustaka (studi literatur) dan sumber data sekunder. Teknik analisis data penelitian ini terdapat tiga teknik analisis data yang digunakan, yang pertama adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendorong munculnya gerakan sosial demonstrasi mahasiswa terbagi menjadi dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal, seperti meningkatnya kesadaran politik dan ideologi mahasiswa yang berkembang dari lingkungan kampus dan dinamika sosial. Faktor eksternal, yaitu adanya ketidakpuasan terhadap kebijakan publik pemerintah yang dianggap tidak adil atau tidak transparan, dan lain-lain. Adapun tahapannya terdiri atas empat tahapan yaitu tahap kemunculan (emergent), tahap peleburan (cholescene), tahap birokratisasi (bureaucratization), dan tahap penurunan (decline).

Kata Kunci: Gerakan Sosial, Demonstrasi Mahasiswa, Kritik, Pemerintah

ABSTRACT

This study aims to determine the driving factors for the emergence of student demonstration social movements and the stages of student demonstration social movements as criticism of the Government in the city of Makassar. This study uses a qualitative research type with a descriptive approach. The data collection techniques used are literature studies and secondary data sources. The data analysis techniques in this study include three data analysis techniques, the first is data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study indicate that the driving factors for the emergence of student demonstration social movements are divided into two factors, namely internal and external factors. Internal factors, such as increased political awareness and student ideology that develop from the campus environment and social dynamics. External factors, namely dissatisfaction with government public policies that are considered unfair or non-transparent, and others. The stages consist of four stages: the emergence stage (emergent), the fusion stage (cholescene), the bureaucratization stage (bureaucratization), and the decline stage (decline).

Keywords: Social Movement, Student Demonstration, Criticism, Government

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara demokrasi yang berlandaskan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD 1945). Setiap orang di negara ini bebas menyuarakan pikiran dan pendapatnya. Demonstrasi seringkali dipilih sebagai sarana untuk menyalurkan aspirasi sekelompok orang kepada pemerintah guna mengkritisi kinerjanya dan menentang kebijakan suatu pihak. Sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum yang dimaksud yaitu demonstrasi atau unjuk rasa, kegiatan ini dilakukan oleh satu orang atau lebih untuk mengeluarkan gagasan, pikiran dan pendapat secara lisan dan tulisan di muka umum (Setyoko dan Satria, 2020). Demonstrasi juga dapat dilakukan dalam upaya untuk memberikan tekanan politik kepada pemerintah demi kepentingan suatu kelompok. Kehidupan suatu bangsa yang

maju tidak dapat terlepas dari kaum terpelajarnya, terutama mahasiswa. Demikian pula, gerakan demonstrasi mahasiswa merupakan bagian integral dari negara dan bangsa Indonesia.

Menurut (Hapsari & Sarwono, 2017) gerakan sosial adalah aktivitas kolektif dalam jaringan pelaku yang dipersatukan oleh solidaritas dan rasa identitas bersama yang kuat sebagai langkah protes dalam menyuarkan hak. Dapat disimpulkan bahwa gerakan sosial adalah aktivitas yang berfokus pada isu-isu sosial dan politik yang muncul dari ketidakpuasan dan melakukan aksi dengan tujuan tertentu. Gerakan sosial menawarkan solusi dari kebuntuan masyarakat sipil, terutama dalam hal menghentikan penyimpangan dari pemerintah. Hal ini terjadi ketika aktor politik di suatu negara berkonspirasi dengan para pemimpin, yang kemudian memanipulasi persepsi publik. Tidak semua gerakan sosial mampu membawa perubahan sosial yang signifikan. Namun, sering ditemukan gerakan sosial dapat menjadi panggung terjadinya konflik yang berlarut-larut. Sebagian besar gerakan sosial tidak bertahan lama sampai perubahan yang diinginkan tercapai. Dengan adanya demokrasi, muncullah gerakan mahasiswa, yang identik dengan gerakan sosial pada umumnya. Gerakan mahasiswa juga menggelar protes besar-besaran dan berbagai kegiatan lainnya untuk mencapai tujuan mereka (Hasanuddin, 2016).

Demonstrasi mahasiswa tidak boleh diremehkan karena memiliki pengaruh besar terhadap politik Indonesia. Mahasiswa berhak untuk berdemonstrasi dan menyuarkan aspirasi mereka ketika aturan tidak sejalan dengan kenyataan. Karena, mahasiswa merupakan salah satu komponen rakyat. Mahasiswa dianggap sebagai kelompok sosial yang memiliki kapasitas intelektual untuk memahami kondisi dalam kehidupan sosial bangsa dan negara. Selain itu, mahasiswa merupakan agen perubahan atau *agen of change* yang memiliki peran penting bagi perbaikan kehidupan masyarakat. Lebih lanjut, di era global ini, mahasiswa berperan sebagai panutan sosial yang perilaku dan tindakannya didasarkan pada pengetahuan dan norma yang ada dalam kehidupan. Tingkat kesejahteraan masyarakat biasanya menjadi titik awal ketidakpuasan sosial. Sehingga, gerakan mahasiswa akan selalu muncul sebagai akibat dari pandangan kritis mahasiswa ketika kesejahteraan tidak tercapai. Di sinilah pemerintah harus mampu mengakomodir aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa dan mendukung tujuan mahasiswa tersebut, karena jika aspirasi yang tidak tertampung dan tujuan yang tidak tercapai, maka seringkali berujung pada tindakan anarkis (Oktariza dkk., 2024).

Ruang publik Indonesia baru-baru ini diwarnai oleh fenomena unjuk rasa di berbagai wilayah. Aksi berpusat di Jakarta, khususnya di sekitar kompleks Gedung DPR/MPR RI, dengan gelombang protes yang tak kalah ramai di sejumlah kota besar lainnya. Aksi yang dimulai sejak Senin, 25 Agustus 2025 ini diikuti oleh ribuan demonstran dari berbagai elemen, mulai dari kalangan mahasiswa, buruh, asosiasi pengemudi ojek online, hingga masyarakat sipil. Protes memanas pada Kamis, 28 Agustus, setelah mobil polisi melindas Affan Kurniawan, pengemudi ojek online, hingga tewas. Insiden tersebut memicu perubahan dari unjuk rasa damai menjadi kerusuhan anarkis. Terkhusus di Kota Makassar, sebagai pusat pendidikan tinggi di Indonesia Timur, dikenal memiliki sejarah panjang gerakan mahasiswa. Dalam kurun 2020–2025, berbagai aksi mahasiswa tercatat mewarnai ruang publik kota, mulai dari isu kenaikan harga BBM, alokasi anggaran pendidikan, hingga kritik dan tuntutan terhadap kebijakan pemerintah pusat yang dianggap tidak pro-rakyat. Data menunjukkan bahwa Sulawesi Selatan, dengan Makassar sebagai episentrumnya, menjadi salah satu daerah dengan intensitas aksi demonstrasi tertinggi di Indonesia.

Meskipun demonstrasi kerap dipandang mengganggu ketertiban publik, perlu dipahami bahwa aksi mahasiswa pada dasarnya merupakan bentuk kritik sekaligus tuntutan kepada pemerintah. Kritik muncul sebagai refleksi terhadap kebijakan yang tidak sesuai dengan aspirasi rakyat, sedangkan tuntutan mengacu pada solusi dan rekomendasi yang diajukan mahasiswa agar kebijakan dapat lebih berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Dalam praktiknya, demonstrasi mahasiswa di Makassar tidak lepas dari tantangan. Respons aparat keamanan, framing media, hingga persepsi publik seringkali memengaruhi legitimasi aksi. Beberapa aksi berujung bentrok dan dianggap anarkis, yang kemudian mengaburkan substansi tuntutan. Namun, pada sisi lain, demonstrasi juga mendorong pemerintah untuk membuka ruang dialog dengan mahasiswa, sehingga memungkinkan adanya perbaikan kebijakan.

Berdasarkan dengan uraian diatas maka penulis tertarik dengan memilih judul "Gerakan Sosial Demonstrasi Mahasiswa Sebagai Kritik dan Tuntutan Terhadap Pemerintah di Kota Makassar". Alasan penulis memilih judul ini, karena permasalahan ini merupakan hal penting untuk diulas dan dipahami secara mendalam, mengingat hal ini sangat relevan karena menawarkan wawasan terperinci tentang bagaimana keadaan nyata yang terjadi dilapangan dan faktor yang mempengaruhi, serta tahapan gerakan sosial demonstrasi mahasiswa di Kota Makassar.

2. METODE PELAKSANAAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan bersifat deskriptif. Studi ini dilakukan di Kota Makassar. Fokus dalam penelitian ini adalah gerakan sosial demonstrasi mahasiswa sebagai kritik dan tuntutan terhadap pemerintah di kota Makassar. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian pustaka (studi literatur) yaitu proses pengumpulan data dan menganalisis informasi dengan cara menelaah sumber-sumber tertulis yang relevan dan terkait dengan pokok bahasan, seperti jurnal ilmiah, buku referensi, dan sumber-sumber terpercaya lainnya yang tersedia dalam format digital. Dengan menelaah beberapa referensi maka diperoleh data atau ringkasan tentang masalah yang dibahas. Sehingga, sumber data yang di gunakan adalah data sekunder. Dimana, data sekunder adalah data pendukung yang dapat di peroleh dari literatur tulisan yang berkaitan dengan judul penelitian.

Teknik analisis data penelitian ini terdapat tiga teknik analisis data yang digunakan, yang pertama adalah reduksi data pada teknik ini peneliti meringkas dan fokus terhadap bahasan pokok yang dianggap penting. Kedua, penyajian data yaitu peneliti melakukan penyajian sekumpulan data secara sistematis. Dan ketiga, penarikan kesimpulan yaitu peneliti akan menarik kesimpulan awal yang jika didukung dengan bukti pendukung yang akurat, maka kesimpulan tersebut dianggap kesimpulan kredibel. Penelitian ini berupaya mendapatkan informasi rinci dan komprehensif dari data yang dikumpulkan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori Identitas Kolektif

Teori identitas kolektif menjelaskan bahwa gerakan sosial dimulai ketika orang-orang menyadari bahwa mereka memiliki identitas kelompok yang kuat yang menyatukan mereka untuk mendukung tujuan bersama. Demonstrasi mahasiswa di kota Makassar merupakan bukti nyata pembentukan identitas kolektif melalui pengalaman bersama dalam menghadapi ketidakadilan dan menyerukan perubahan. Interaksi sosial langsung selama aksi skala besar dan komunikasi media sosial memperkuat identitas kolektif ini, yang menjadi dasar dedikasi terhadap gerakan. Rasa persatuan yang melampaui individu dipupuk oleh rasa senasib tentang ketidakadilan dan seruan untuk perubahan, yang membantu gerakan ini bertahan dan beradaptasi dengan hambatan internal maupun eksternal. Identitas kolektif juga memengaruhi dinamika gerakan dengan memengaruhi bagaimana mahasiswa bersatu dan terus mengkritik pemerintah sebagai bagian dari perjuangan sosial politik.

Keterkaitan teori dengan artikel diantaranya identitas kolektif adalah rasa kebersamaan dan kesadaran, rasa solidaritas, nilai, dan tujuan bersama yang menjadi landasan utama untuk membangun kekuatan kolektif dalam mengkritik dan memberi tuntutan perubahan sosial dan politik secara bersama-sama pada pemerintah di kota Makassar. Demonstrasi ini tidak hanya bersifat tuntutan politik, tapi juga ekspresi identitas kelompok mahasiswa yang menuntut pengakuan, keadilan, dan legitimasi suara mereka dalam konteks kekuasaan pemerintah kota. Identitas kolektif menciptakan ikatan emosional dan sosial yang mendorong aksi kolektif yang berkelanjutan. Dengan memakai teori identitas kolektif, artikel dapat mengkaji bagaimana kebersamaan dan kesadaran kolektif mahasiswa mempengaruhi dinamika gerakan sosial dalam demonstrasi (Ivan, 2020).

Faktor Pendorong Munculnya Gerakan Sosial Demonstrasi Mahasiswa

Secara sederhana, gerakan sosial adalah respons masyarakat terhadap krisis yang berupaya membawa perubahan signifikan dalam kehidupan sosial. Dalam (Anshori & Nadiyya, 2023) mendefinisikan gerakan sosial sebagai sekumpulan orang yang bersatu untuk mengatasi suatu isu sekaligus mencegah terjadinya perubahan sosial. Beragam reaksi kelompok terhadap praktik politik, sosial, dan ekonomi yang tidak adil seringkali menjadi bagian dari gerakan sosial. Sehingga, gerakan sosial dianggap penting bagi mahasiswa, masyarakat dan organisasi pergerakan. Gerakan sosial juga dapat mencakup organisasi buruh dan tani, gerakan mahasiswa, hak-hak perempuan, hak-hak anak, dan hak-hak lingkungan. Gerakan sosial dicirikan oleh sifat antikekerasan, kemandirian, dan kesadaran kritisnya. Sehingga dianggap, betapa pentingnya gerakan mahasiswa bagi transformasi sosial dan politik Indonesia.

Namun, dari semuanya, gerakan mahasiswa bukanlah pertempuran yang terisolasi. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada satu komponen pun yang memiliki kekuatan untuk mengubah masyarakat. Gerakan mahasiswa biasanya hanya berfungsi sebagai pemicu perlawanan terhadap *status quo*. Setelah kekuatan berhasil dipatahkan, seluruh kekuatan diserahkan kepada kelompok lain untuk dilanjutkan. Oleh karena itu, gerakan sosial seharusnya menyatukan dan mengintegrasikan berbagai aspek masyarakat yang memiliki tujuan serupa untuk perubahan sosial (Khusniah, 2024).

Salah satu cara untuk melihat gerakan mahasiswa adalah upaya menyampaikan aspirasi melalui demonstrasi. Sebelum demonstrasi, mahasiswa berkumpul untuk berdiskusi tentang topik-topik yang dianggap merugikan masyarakat. Demi kepentingan dari orang yang dipimpin, sekaligus demi penyampaian gagasan dan pembangunan pemerintahan Indonesia yang jujur, gerakan mahasiswa sangatlah penting. Di antara kepentingan-kepentingan tersebut adalah hak-hak sosial masyarakat, yang diupayakan melalui demonstrasi. Kekuatan mahasiswa dalam menyatukan suara merupakan kekuatan yang ampuh untuk perubahan positif yang sejalan dengan cita-cita dan tatanan pemerintahan suatu negara Indonesia (Mardianti E, 2022).

Seperti di wilayah lain Indonesia, gerakan sosial yang dilakukan mahasiswa di Makassar seringkali berpusat pada isu-isu politik, sosial, dan ekonomi. Menurut (Ayuni dkk., 2021) bahwa di Kota Makassar, dinamika gerakan mahasiswa biasanya berganti dari tahun ke tahun. Karena isu yang diangkat dalam aksi protes selalu berkaitan dengan perkembangan. Gerakan-gerakan ini didorong oleh momentum dan mengangkat isu-isu yang masih relevan di tingkat lokal, regional, dan nasional. Selain itu, gerakan sosial juga dapat muncul karena berbagai alasan. Misalnya, sekelompok mahasiswa dapat memulai gerakan untuk mengubah peraturan pemerintah agar lebih mencerminkan situasi mereka agar dapat berfungsi sebagai agen perubahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.

Berbagai latar sosial dan politik, termasuk ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah, penindasan politik, ketidakadilan sosial, dan keinginan untuk perubahan politik, seringkali menjadi pemicu terjadinya gerakan mahasiswa. Mahasiswa menanggapi berbagai kekhawatiran di Makassar maupun di tingkat nasional, di mana mereka meyakini bahwa kebijakan pemerintah yang diskriminatif baik yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, lingkungan, maupun ekonomi merugikan masyarakat maupun mahasiswa itu sendiri.

(Liputan6.com/Fauzan, 2025) mengungkapkan bahwa:

Pada tanggal 29 Agustus 2025 Jumat malam, unjuk rasa berakhir dengan keriuhan terjadi di depan Kantor DPRD Kota Makassar, Jalan AP Pettarani. Aliansi Mahasiswa Makassar yang berorasi di Jalan menegaskan bahwa Indonesia saat ini butuh reformasi. Situasi yang terjadi belakangan ini dianggap telah mengganggu stabilitas sosial, politik, hingga ekonomi. Selain itu, beberapa tuntutan juga dilayangkan. Di antaranya meminta DPR RI membatalkan kenaikan gaji dan tunjangan perumahan anggota DPR RI, menyikapi tindakan represif aparat kepolisian terhadap rakyat, serta menuntut pemerintah mengembalikan kedaulatan rakyat. Ditambah aksi tersebut digelar sebagai bentuk

solidaritas atas tewasnya pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, yang meninggal dunia setelah dilindas mobil baracuda milik Brimob saat aksi demonstrasi di Jakarta.

Menjelang petang, sebagian mahasiswa kembali ke kampus. Namun, sebagian lainnya tetap bertahan hingga malam. Mahasiswa kembali menutup akses pada kedua ruas jalan. Kayu dipasang melintang di tengah jalan dan mereka juga membakar ban. Situasi menjadi tak terkendali saat polisi membubarkan aksi dengan menembakkan gas air mata. Aparat memaksa demonstran membuka jalan akibat kemacetan yang kian panjang. Di tengah upaya membubarkan aksi, warga di sekitar lokasi juga keluar dan melempar batu. Situasi kian tak terkendali. Sehingga, demokrasi berujung ricuh dan imbasnya gedung DPRD terbakar yang dilakukan oleh sekelompok OTK yang melakukan penjarahan.

(news.okezone.com/Abdoellah, 2025) mengungkapkan bahwa:

Kejadian tersebut tidak dilakukan oleh demonstran mahasiswa tetapi oleh pelaku tindak pidana. Menurut Kabid Humas Polrestabes Makassar, jumlah tersangka terus bertambah kini menjadi 53 orang, dari 11 orang menjadi 29 orang. Ia juga menegaskan bahwa orang-orang yang ditangkap adalah pelaku kriminal, bukan pengunjung rasa. Demonstrasi tidak hanya berakhir ricuh, tetapi juga menyebabkan kerusakan yang signifikan, termasuk pembakaran dua pos polisi dan dua gedung DPRD. Empat orang juga tewas dalam tragedi tersebut, sementara banyak lainnya luka-luka. Ia mengatakan bahwa selain itu, tersangka juga terlibat dalam beberapa tindakan anarkis, berupa penjarahan, kerusakan, pembakaran, hingga penganiayaan pengemudi ojek online.

(rakyatsulsel-fajar.co.id/Fahrullah, 2025) mengungkapkan bahwa:

Titik aksi dengan jumlah massa paling banyak berada di flyover Jalan AP Pettarani. Ratusan mahasiswa Universitas Bosowa (UNIBOS) dan Universitas Negeri Makassar (UNM) menggelar unjuk rasa dengan membakar ban dan memblokir jalan yang diiringi orasi tuntutan protes kepada pemerintah. Mereka juga membawa sejumlah spanduk berisi tuntutan mereka. Jenderal Lapangan sekaligus Wakil Presiden BEM UNM, Ragiel Herman menyerukan tentang kondisi Indonesia berada di tengah krisis demokrasi, keadilan, dan kedaulatan rakyat. Sejumlah tindakan pemerintah justru menunjukkan arah yang semakin menjauh dari cita-cita Indonesia. Ia berpendapat bahwa meskipun pemerintah mempertahankan kekuasaan dan kekayaan melalui regulasi, inisiatif pembangunan, dan manipulasi sejarah, kebijakan-kebijakannya justru meminggirkan kepentingan rakyatnya sendiri. Negara dinilai menjual kedaulatannya, membungkam kritik dan menindas warga negaranya sendiri. Sehingga, mahasiswa menyerukan "perlawanan" dalam bentuk protes terhadap kebijakan yang dianggap semata-mata menguntungkan kaum elit. "Aksi ini merupakan bentuk kritik dan mengekspresikan ketidaksetujuan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap semakin mengasingkan rakyat, padahal sebenarnya hanya menguntungkan kaum elit dan berkuasa. Dalam protes hari ini, kami memiliki beberapa tuntutan utama," ujar Ragiel.

Gerakan sosial mahasiswa di Kota Makassar memiliki beragam bentuk, mulai dari unjuk rasa, diskusi terbuka, orasi massa hingga demonstrasi berskala besar. Demonstrasi ini berfungsi sebagai bentuk kritik langsung terhadap kebijakan pemerintah daerah dan pusat. Sejalan dengan gagasan gerakan sosial sebagai tindakan kolektif yang bertujuan untuk perubahan sosial, gerakan ini dilakukan tidak hanya bentuk penolakan atau protes, tetapi juga berupaya mengajukan tuntutan dalam bentuk solusi positif dan rekomendasi kebijakan yang bersifat konstruktif.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa faktor pendorong munculnya gerakan sosial demonstrasi mahasiswa terbagi menjadi faktor internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri mahasiswa sendiri, seperti meningkatnya kesadaran politik dan ideologi mahasiswa yang berkembang dari lingkungan kampus dan dinamika sosial. Faktor eksternal berasal dari luar, ketidakpuasan terhadap kebijakan publik pemerintah yang dianggap tidak adil atau tidak transparan, seperti penolakan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) yang dinilai bermasalah karena disusun terburu-buru dan minimnya masukan publik. Hal yang paling tidak rasional mengenai rencana kenaikan tunjangan DPR. Kebijakan ini dianggap sebagai wajah telanjang dari politik elit yang jauh dari penderitaan rakyat. Di tengah kondisi rakyat sudah terbebani oleh meningkatnya

kenaikan harga pokok, biaya kesehatan, pendidikan, malah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bertindak sebagai wakil rakyat, menuntut peningkatan kesejahteraan pribadi. Isu lain yang disuarakan yakni mengenai intimidasi, kriminalisasi terhadap gerakan rakyat untuk segera dihentikan, tolak tarif resipokal AS-Indonesia, tolak proyek strategis nasional yang tidak pro rakyat, tolak Revisi UU Pokok Agraria dan wujudkan reforma agraria sejati, wujudkan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis, serta tolak kenaikan PBB P2 di berbagai daerah di Indonesia. Serta pengaruh sosial-media sebagai sarana mobilisasi massa. Faktor ini sejalan dengan teori gerakan sosial, yang menekankan bahwa pemicu utama aksi sosial adalah kondisi struktural dan kesadaran kolektif.

Tahapan Gerakan Sosial Demonstrasi Mahasiswa

Gerakan sosial merupakan komponen penting dari proses demokrasi. Pembentukan kelompok-kelompok sosial yang peduli terhadap keadaan dalam upaya demokratisasi merupakan dinamika demokrasi. Organisasi-organisasi ini diorganisir untuk memastikan proses demokratisasi berjalan lancar. Tujuan dari fenomena gerakan sosial ini adalah untuk mengubah masyarakat ke arah demokrasi. Lembaga atau organisasi pemerintah tidak diwajibkan untuk memimpin gerakan sosial. Dalam gerakan sosial demonstrasi mahasiswa yang terjadi di kota Makassar ini melalui empat tahapan yaitu tahap kemunculan (*emergent*), tahap peleburan (*cholescene*), tahap birokratisasi (*bureaucratization*), dan tahap penurunan (*decline*) (Fadly & Agustang, 2022). Berikut ini untuk penjelasan lebih lengkapnya:

a. Tahap Kemunculan (*Emergent*)

Tahap kemunculan gerakan sosial demonstrasi mahasiswa di Makassar ditandai dengan adanya kesadaran kolektif akan ketidakadilan ekonomi khususnya, kebijakan kenaikan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang signifikan, sementara masyarakat mengalami inflasi dan tingkat pengangguran yang tinggi. Sebuah video yang diduga memperlihatkan anggota dewan "merayakan" tunjangan tersebut menjadi viral di media sosial pada awal Agustus 2025, memicu perdebatan mahasiswa. Berdasarkan riset terkini, mahasiswa di Makassar memulai aksi protes ini dengan melibatkan massa yang cukup besar. "Rasa ketidakadilan dan krisis demokrasi menjadi pemicu utama munculnya gerakan ini sebagai cara menyuarakan arah pembangunan nasional yang jauh dari cita-cita bangsa," ujar Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa UNM, Ragiel Herman, yang menjabat sebagai Jenderal Lapangan aksi tersebut.

Secara teoritis, tahap *emergence* melibatkan "pembentukan definisi situasi" di mana aktor sosial mulai mengidentifikasi ketidakadilan sebagai ancaman bersama, yang kemudian memobilisasi energi kolektif. Tahapan kemunculan ini juga berkaitan dengan adanya hambatan struktural yang menyebabkan ketidakpuasan masyarakat. Contoh nyata dari proses terlihat dalam aksi protes Makassar, ketika mahasiswa secara kolektif menanggapi hambatan struktural berupa kebijakan pemerintah yang tidak memenuhi harapan rakyat.

b. Tahap Peleburan (*Cholescene*)

Pada fase ini, massa demonstran mulai membentuk koalisi antar organisasi mahasiswa dan membentuk strategi yang lebih jelas. Setelah massa berkumpul, tokoh penggerak (organisasi kepemudaan, perwakilan BEM kampus, dan sekelompok aktivis lokal) mulai membuat pernyataan tuntutan, membuka kontak media, dan mengorganisir jalur aksi (blokade, orasi bergilir, dan memo). Penyiaran tuntutan melalui platform daring yang mempercepat pembentukan tuntutan dan menarik dukungan dari berbagai segmen masyarakat juga berkontribusi pada konsolidasi ini.

Di lokasi titik utama strategis kota, termasuk di bawah flyover Jalan AP Pettarani dan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan, para pengunjung rasa bergantian membentangkan spanduk dan berorasi. Pelaksanaan tahap ini didukung oleh koordinasi antar BEM kampus dan organisasi kemahasiswaan di berbagai universitas di Makassar. Tahap ini adalah masa penguatan jaringan sosial dan peningkatan kapasitas

mobilisasi massa. Tahap ini muncul ketika sebuah gerakan menemukan "frame" yang sama dan mekanisme koordinasi dan penting agar gerakan sosial memperoleh legitimasi dan berhasil menyuarakan tuntutan secara fokus dan terorganisir tahap konsolidasi. Selain itu, tahap ini sebagai fase di mana aktor membangun jaringan repertoar aksi kolektif, seperti demonstrasi untuk mempertahankan momentum.

c. Tahap Birokratisasi (*Bureaucratization*)

Birokratisasi gerakan sosial ditandai dengan keterlibatan elemen formal dan terstruktur, seperti penggunaan metode aksi terencana, yang dicirikan oleh distribusi tugas dan kontak yang lebih hierarkis dengan lembaga pemerintah. Sebagai perwakilan organisasi mahasiswa di Makassar, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) universitas berperan penting dalam mengawal aksi di tingkat administratif dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat keamanan. Mahasiswa dan polisi terlibat dalam percakapan langsung dan intensif selama aksi, tetapi ketegangan juga meningkat akibat demonstrasi yang berlarut-larut dan tuntutan yang semakin kuat.

Dalam gerakan sosial yang terjadi ini belum sepenuhnya merangkul birokratisasi formal pada hari pertama setelah 25 Agustus. Jaringan tetap menggunakan komite koordinasi jangka pendek dan alat komunikasi cepat. Meskipun demikian, upaya awal untuk menciptakan "kanal perundingan" mengenai pertemuan antara delegasi mahasiswa dan anggota pemerintah daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk menyampaikan tuntutan tertulis. Dengan kata lain, gerakan tersebut melewati fase hibriditas, dengan beberapa anggota tetap bersikap taktis dan non-hierarkis sementara aktor berusaha menyampaikan aspirasi mereka melalui cara resmi. Proses birokratisasi dalam kajian akademis dapat menimbulkan kesulitan bagi dinamika gerakan, terutama ketika unsur formal mulai diutamakan daripada inisiatif massa yang spontan. Hal ini dapat melemahkan daya gerakan mahasiswa yang kritis sekaligus memberikan legitimasi hukum bagi aksi tersebut.

d. Tahap Penurunan (*Decline*)

Tahap decline muncul ketika tuntutan terpenuhi sebagian atau kehilangan momentum. Setelah protes sengit pada 25 Agustus, fase kemunduran dimulai dan berlangsung selama beberapa hari sebelum berujung menjadi kerusuhan pada 29 Agustus yang merenggut nyawa dan mengakibatkan penghancuran kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) menyampaikan penyesalan mendalam mereka atas hal ini, mengklaim bahwa perilaku anarkis bukanlah indikasi gerakan mahasiswa yang sejati. Tekanan dari pemerintah, kelelahan massa, dan kekhawatiran tentang konsekuensi yang dapat merusak reputasi gerakan menyebabkan protes menjadi kurang intens. Tahap penurunan (decline) gerakan sosial dapat terjadi karena adanya represi, pertikaian internal, atau perubahan situasi politik yang memengaruhi daya mobilisasi. Namun, meskipun aksi fisik menurun, kapasitas gerakan untuk kritik sosial tetap bertahan berkat kontribusi intelektual mahasiswa dan publikasi tuntutan yang berkelanjutan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa

- a. Faktor pendorong munculnya gerakan sosial demonstrasi mahasiswa terbagi menjadi faktor internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri mahasiswa sendiri, seperti meningkatnya kesadaran politik dan ideologi mahasiswa yang berkembang dari lingkungan kampus dan dinamika sosial. Faktor eksternal berasal dari luar, ketidakpuasan terhadap kebijakan publik pemerintah yang dianggap tidak

adil atau tidak transparan, seperti penolakan (RKUHAP) yang dinilai bermasalah karena disusun terburu-buru dan minimnya masukan publik. Hal yang paling tidak rasional mengenai rencana kenaikan tunjangan DPR, dan beberapa tuntutan lainnya.

- b. Gerakan demonstrasi mahasiswa di kota Makassar melalui empat tahapan klasik gerakan sosial: tahap kemunculan, peleburan, birokratisasi, dan penurunan. Pada tahap kemunculan, terdapat reaksi spontan terhadap isu kebijakan pemerintah, yang diikuti dengan pembentukan kesadaran bersama di antara mahasiswa terkait ketidakadilan sosial. Selanjutnya, tahap peleburan memperlihatkan pengorganisasian yang lebih sistematis melalui jejaring antar kampus dan organisasi. Tahap birokratisasi, ditandai dengan munculnya struktur formal dalam gerakan, seperti koalisi mahasiswa dan pembagian peran yang jelas. Tahap decline muncul ketika motivasi massa menurun, sebagian tuntutan telah dipenuhi, atau konflik internal dan tekanan eksternal melemahkan kekompakan gerakan.

REFERENSI

- Akbar, I. (2016). Demokrasi dan gerakan sosial (Bagaimana gerakan mahasiswa terhadap dinamika perubahan sosial). *Jurnal Wacana Politik*, 1(2), 107-115.
- Anshori, I., & Nadiyya, F., A., A. (2023). Peran Ruang Digital Sebagai Transformasi Gerakan Aksi Sosial Mahasiswa Melalui Platform Sosial Media. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 12(2), 343-362.
- Bunajar, H., & Wardhani, N. W. (2023). Gerakan Mahasiswa Dalam Bentuk Demonstrasi Sebagai Bagian Dari Demokrasi Pada Masa Orde Baru. *Ganesha Civic Education Journal*, 5(1), 52-56.
- Fadly, M., & Agustang, A. (2022). Gerakan Sosial Masyarakat Bara-Barayya dalam Sengketa Lahan di Kota Makassar. *Pinisi Journal of Sociology Education Review*, 2(2), 11-21.
- Fithriyatirrizqoh, F., & Zhanaty, N. A. (2024). Mengkaji Keefektifan Gerakan Mahasiswa dalam Mendorong Perubahan Kebijakan Pemerintah Melalui Demonstrasi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(24.2), 491-504.
- Hasanudin, H. (2016). Anatomi Gerakan Sosial di Riau: Refleksi Atas Dinamika Perlawanan Masyarakat Riau terhadap Negara 1998-2001. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 8(2), 161-175.
- Ivan, M. (2020). Proses Pembentukan Identitas Kolektif Aliansi Laki-Laki Baru Dalam Gerakan Keadilan Gender (*Bachelor's thesis, Fisip UIN Jakarta*).
- Khusniah, K. W. (2024). Gerakan Sosial dan Hak Asasi Manusia dalam Masa Transisi Demokrasi di Indonesia. *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora*, 2(1), 447-455.
- Mage, R. I. (2020). Meredupnya Gerakan Mahasiswa Pasca Pemilihan Presiden 2014. *Jurnal Akses*, 12(2), 87-96.
- Mardianti, E. (2022). Gerakan mahasiswa dalam pusaran tiga orde kekuasaan: antara gerakan moralis atau gerakan politis. *POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 2(2), 82-103.
- Oktariza, S., Rafni, A., Suryanef, S., & Hamdi, I. (2024). Aksi demonstrasi mahasiswa Universitas Negeri Padang sebagai saluran aspirasi politik. *Journal of Education, Cultural and Politics*, 4(1), 237-247.
- Setyoko, J., & Satria, M. D. (2020). Gerakan mahasiswa sebagai agen perubahan sosial di Kabupaten Bungo. *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah*, 2(1), 12-24.
- Abdoellah. (2025, September 16). *53 Orang Jadi Tersangka Demo di Makassar, ATM berisi Rp320 Juta digondol*. Retrieved from news.okezone: <https://news.okezone.com/amp/2025/09/16/340/3170405/53-orang-jadi-tersangka-demo-di-makassar-atm-berisi-rp320-juta-digondol>
- Fahrullah. (2025, Agustus 25). *Demo 25 Agustus di Makassar, Ratusan Mahasiswa dari Berbagai Kampus Turun ke Jalan*. Retrieved from rakyat Sulsel.fajar:

<https://rakyatsulsel-fajar-co-id.cdn.ampproject.org/v/s/rakyatsulsel.fajar.co.id/2025/08/25/demo-25-agustus-di-makassar-ratusan-mahasiswa-dari-berbagai-kampus-turun-ke-jalan/amp>
Fauzan. (2025, Agustus 25). *Demo 25 Agustus: Mahasiswa Makassar Tutup Jalan, Tolak Tunjangan Anggota DPR*. Retrieved from Liputan6.com:
<https://www.liputan6.com/regional/read/6141829/demo-25-agustus-mahasiswa-makassar-tutup-jalan-tolak-tunjangan-anggota-dpr>